



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1. <i>RADAR BANTEN</i>	4. <i>SATELIT NEWS</i>	22	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
2. <i>BANTEN POS</i> ✓	5. <i>BANTEN RAYA</i>		FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
3. <i>KABAR BANTEN</i>	6.		MARET	JULI	NOVEMBER	
			APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

KELEBIHAN PEMBAYARAN JADI TEMUAN

SERANG, BANPOS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten mengungkap adanya kelebihan pembayaran di tiga pemerintah daerah (Pemda) di Banten.

Diketahui, Pada semester II tahun 2023, BPK fokus pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan. Berdasarkan beberapa hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh

BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan pengujian yang dilakukan secara uji petik atas belanja infrastruktur jalan tahun anggaran 2023 (sampai 30/11/ BACA **KELEBIHAN** HAL - 9



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS ✓	5.	BANTEN RAYA
3.	KABAR BANTEN	6.	

22	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
	MARET	JULI	NOVEMBER	
	APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Kelebihan Pembayaran...

Sambungan dari Halaman 1

2023) pada tiga pemerintah daerah di Banten yakni Pemprov Banten, Pemkab Tangerang, dan Pemkab Pandeglang.

BPK menemukan adanya beberapa permasalahan pada pelaksanaan pekerjaan jalan yang menjadi temuan, antara lain paving block, aspal, dan beton serta belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan yang tidak sesuai ketentuan kontrak. Sehingga mengakibatkan kelebihan atau adanya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp11,82 miliar. Kelebihan atau potensi kelebihan pembayaran itu yang terjadi pada Pemprov Banten sebesar Rp5,11 miliar, Pemkab Tangerang sebesar Rp5,92 miliar, dan Pemkab Pandeglang sebesar Rp789,35 juta.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Dede Sukarjo. Ia mengungkapkan, kelebihan pembayaran itu terjadi karena pengawasan dan pemeriksaan saat ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan masih kurang.

"Jadi semestinya, saat penandatanganan serah terima pekerjaan, dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, sehingga persoalan kekurangan volume sudah dapat teridentifikasi," katanya, Jumat, (19/1).

Dede menyampaikan, pada tiga Pemda itu terdapat permasalahan terkait volume atau kualitas serta

kualitas. Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik di lapangan dengan metodologi dan alat yang digunakan, ditemukan adanya kekurangan-kekurangan. Dede juga mengungkapkan bahwa hasil temuan itu telah ditindaklanjuti oleh ketiga pemda itu.

"Pemkab Tangerang sudah setor seluruhnya. Kemudian Pemkab Pandeglang, menindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp726,79 juta. Tinggal Rp63 juta yang belum ditindaklanjuti. Kalau Provinsi, dari Rp5,11 miliar pengembalian ke kas daerah sebesar Rp3,11 miliar, memang baru separuhnya," ungkapnya.

Dede menyampaikan bahwasanya, temuan kelebihan pembayaran itu ada di OPD yang menangani kebiaksanaan. Dirinya juga mendorong agar temuan yang pihaknya sampaikan itu ditindaklanjuti oleh Pemda terkait, setidaknya paling lambat dalam jangka waktu 60 hari. Adapun tindak lanjut itu yakni berupa pembertan jawaban.

Ia juga menekankan bahwa Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. "Kami mendorong Pemda responsif dalam menindaklanjuti BPK. Tapi kalau lihat perkembangannya tak bisa dilaksanakan. Menanggapi terkait mangkraknya pembangunan RSJKO itu, Direktur Rumah Sakit Di Daerah Pusateras-

terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Keputusan pada semester II tahun 2023 yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, PJ Gubernur Banten Al Muktabar menerangkan, bahwa sebelum menjadi LHP, pihaknya berupaya untuk melakukan penyelesaian.

"Kita akan selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tegasnya. Al mengatakan, ada waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, baik itu kinerja maupun keputusan. "Kita tentu akan patuh terhadap itu dan melaksanakannya. Juga tentu bersama DPRD," katanya.

Al mengungkapkan, pihaknya sedang menstrukturkan penyelesaian temuan sebesar Rp5,11 miliar tersebut. "Kita akan petakan

itu secara teknis. Karena sifat-sifat dari temuan itu ada prinsip dasarnya," ungkapnya.

Namun, ketika ditanyakan terkait petak apa saja yang menjadi temuan, Al mengaku belum mengetahui karena LHP baru diserahkan. "Kita akan baca satu per satu sesuai dengan apa yang diserahkan BPK, baik itu kinerja dan keputusan," ujarnya.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengaku pihaknya akan melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan yang disampaikan BPK dalam waktu 60 hari. Diharapkan, sebelum akhir masa tenggat penyelesaian tindak lanjut LHP, semua temuan sudah selesai dikembalikan.

Budi mengatakan, pihaknya

akan mendorong OPD teknis di Pemprov Banten untuk mereview kembali, mana yang harus diselesaikan secara cepat.

"Kita akan lakukan pembahasan yang lebih temuan ini. Sebelum akhir (tanggal waktu, red) mudah-mudahan sudah dikembalikan (kelebihan bayar Pemprov, red). Tapi sudah 30 persen yang sudah dikembalikan. Jadi tinggal sedikit lagi. Jadi bisa kita selesaikan dimasa pembahasan nanti," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, kepada wartawan usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Keputusan Semester II tahun 2023 pada Pemprov Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang di Kantor Badan Pe-

meriksa Keuangan Perwakilan Banten II Polka Palma, Serang, Jumat (19/1) pekan lalu mengungkapkan pihaknya akan melakukan pembahasan terkait temuan dan rekomendasi BPK RI. "Ada waktu 60 hari. Mudah-mudahan sebelum waktu akhir masa pembahasan semua hal sudah dikembalikan," ucapnya. "Tapi ada 30 persen yang sudah dikembalikan, kurang dari separuhnya sudah diselesaikan. Sedikit lagi mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan di masa pembahasan," jelas Budi.

Dikatakannya, ia akan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mereview kembali dilaksanakan lebih cepat. "Kami akan lakukan agar percepatan penyelesaian tepat waktu," imbuhnya. [#601990](#)

Mandek Sejak...

Sambungan dari Halaman 1

19, maka anggaran pembangunan tersebut di refocusing untuk penanganan Covid-19. Kemudian, pada APBD tahun anggaran 2022 lalu, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp25 miliar untuk pembangunan RSJKO tersebut. Hanya saja, tiga kali mengalami gagal lelang sehingga pembangunannya tak bisa dilaksanakan.

Menanggapi terkait mangkraknya pembangunan RSJKO itu, Direktur Rumah Sakit Di Daerah Pusateras-

terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Keputusan pada semester II tahun 2023 yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, PJ Gubernur Banten Al Muktabar menerangkan, bahwa sebelum menjadi LHP, pihaknya berupaya untuk melakukan penyelesaian.

"Kita akan selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tegasnya. Al mengatakan, ada waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, baik itu kinerja maupun keputusan. "Kita tentu akan patuh terhadap itu dan melaksanakannya. Juga tentu bersama DPRD," katanya.

Al mengungkapkan, pihaknya sedang menstrukturkan penyelesaian temuan sebesar Rp5,11 miliar tersebut. "Kita akan petakan

itu secara teknis. Karena sifat-sifat dari temuan itu ada prinsip dasarnya," ungkapnya.

Namun, ketika ditanyakan terkait petak apa saja yang menjadi temuan, Al mengaku belum mengetahui karena LHP baru diserahkan. "Kita akan baca satu per satu sesuai dengan apa yang diserahkan BPK, baik itu kinerja dan keputusan," ujarnya.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengaku pihaknya akan melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan yang disampaikan BPK dalam waktu 60 hari. Diharapkan, sebelum akhir masa tenggat penyelesaian tindak lanjut LHP, semua temuan sudah selesai dikembalikan.

Budi mengatakan, pihaknya

akan mendorong OPD teknis di Pemprov Banten untuk mereview kembali, mana yang harus diselesaikan secara cepat.

"Kita akan lakukan pembahasan yang lebih temuan ini. Sebelum akhir (tanggal waktu, red) mudah-mudahan sudah dikembalikan (kelebihan bayar Pemprov, red). Tapi sudah 30 persen yang sudah dikembalikan. Jadi tinggal sedikit lagi. Jadi bisa kita selesaikan dimasa pembahasan nanti," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, kepada wartawan usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Keputusan Semester II tahun 2023 pada Pemprov Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang di Kantor Badan Pe-

meriksa Keuangan Perwakilan Banten II Polka Palma, Serang, Jumat (19/1) pekan lalu mengungkapkan pihaknya akan melakukan pembahasan terkait temuan dan rekomendasi BPK RI. "Ada waktu 60 hari. Mudah-mudahan sebelum waktu akhir masa pembahasan semua hal sudah dikembalikan," ucapnya. "Tapi ada 30 persen yang sudah dikembalikan, kurang dari separuhnya sudah diselesaikan. Sedikit lagi mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan di masa pembahasan," jelas Budi.

Dikatakannya, ia akan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mereview kembali dilaksanakan lebih cepat. "Kami akan lakukan agar percepatan penyelesaian tepat waktu," imbuhnya. [#601990](#)